

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

1. Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* menjelaskan bahwa manajemen tidak digerakkan oleh kepentingan pribadi, melainkan berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi (Donaldson and Davis, 1991). Teori ini menekankan adanya keterkaitan yang erat antara kepuasan pemilik dengan keberhasilan organisasi. Dalam konteks organisasi sektor publik, pemerintah berperan sebagai *steward* yang mengelola sumber daya, sedangkan masyarakat berperan sebagai *principal* atau pemilik sumber daya tersebut. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat dibangun atas dasar kepercayaan dan komitmen bersama untuk mencapai tujuan organisasi secara kolektif.

Tujuan utama organisasi sektor publik adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mempertanggungjawabkan kinerjanya secara terbuka. Oleh karena itu, pemerintah daerah sebagai *steward* berkewajiban mengelola sumber daya secara optimal dan menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas serta akuntabel. Upaya tersebut dilakukan untuk mewujudkan tujuan pemerintah, yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika tujuan tersebut tercapai, maka masyarakat sebagai *principal* akan merasa puas terhadap kinerja pemerintah yang dinilai baik dan bertanggung jawab.

Teori *stewardship* merupakan landasan teoritis yang sangat penting bagi penelitian ini karena menawarkan perspektif yang melengkapi teori keagenan *agency theory*. Teori *stewardship* berasumsi bahwa pengurus koperasi (*steward*) secara intrinsik termotivasi untuk bertindak demi kepentingan terbaik anggota *principal*, sejalan dengan asas kekeluargaan koperasi. Dengan demikian, peran akuntansi yang berkualitas tinggi kepatuhan Standar Akuntansi Keuangan dan pengendalian internal yang kuat dapat diinterpretasikan sebagai bukti komitmen dan tanggung jawab

proaktif dari pengelola yang baik. Transparansi keuangan dalam konteks ini dilihat bukan hanya sebagai alat pengawasan untuk mencegah konflik, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban sukarela yang efektif dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan anggota.

Dalam penelitian ini, teori *stewardship* mendasari hubungan antara transparansi keuangan dan akuntabilitas sebagai cerminan komitmen pengurus KSP Berkah Mulya Sejahtera terhadap kepentingan anggota. Di sini, transparansi berfungsi untuk menyelaraskan tujuan pengurus dengan anggota, bukan hanya untuk mengawasi risiko agensi. Dukungan sistem akuntansi yang handal menjadi bukti nyata motivasi intrinsik pengurus dalam menyajikan laporan keuangan yang kredibel dan tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa standar pelaporan keuangan yang baik merupakan wujud tanggung jawab moral dalam menjaga amanah anggota, termasuk dalam distribusi SHU yang proporsional. Secara esensial, aktivitas akuntansi di koperasi ini merupakan upaya proaktif untuk mencapai kemakmuran bersama dan meningkatkan kesetiaan anggota terhadap organisasi.

2.2 Koperasi

Secara etimologis, koperasi berasal dari kata "*co-operation*" yang berarti kerja sama. Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Menurut Mohammad Hatta, yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia, koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya dengan biaya semurah-murahnya. Esensi dari koperasi bukan sekadar mencari keuntungan *profit oriented*, melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya *member oriented*.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 UU No. 25 Tahun 1992 dan perkembangannya dalam praktik ekonomi di Indonesia, koperasi dapat

dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya:

- 1) Koperasi Produsen: koperasi yang anggotanya adalah para produsen yaitu pemilik barang. Fungsinya mengelola pengadaan bahan baku hingga pemasaran produk yang dihasilkan anggota.
- 2) Koperasi Konsumen: koperasi yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan sehari-hari bagi anggota.
- 3) Koperasi Pemasaran: koperasi yang melakukan kegiatan pemasaran bagi produk-produk yang dihasilkan oleh anggotanya agar mendapatkan harga jual yang kompetitif.
- 4) Koperasi Jasa: Koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa non-simpan pinjam untuk keperluan anggotanya (misalnya: koperasi angkutan, koperasi asuransi).
- 5) Koperasi Simpan Pinjam: Koperasi yang bergerak khusus dalam bidang usaha simpanan dan pinjaman.

Koperasi Simpan Pinjam merupakan lembaga keuangan mikro yang memegang peranan strategis dalam sistem ekonomi kerakyatan. KSP memiliki unit usaha tunggal, yaitu menampung simpanan dari anggota dan memberikan pinjaman kembali kepada anggota dengan bunga yang ringan. Tujuan utama KSP adalah memberikan akses permodalan bagi masyarakat atau anggota yang seringkali tidak terjangkau oleh perbankan konvensional *unbankable*. Keuntungan yang diperoleh KSP dalam bentuk Sisa Hasil Usaha nantinya akan dibagikan kembali kepada anggota secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota.

2.3 Akuntansi

Secara esensial, akuntansi sering kali disebut sebagai "bahasa bisnis" (*language of business*) karena merupakan sarana untuk menyampaikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut *American Accounting Association* (AAA) yang dikutip dalam (Suwardjono, 2014), akuntansi didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian,

pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas serta tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Ditinjau dari fungsinya sebagai sistem informasi, akuntansi merupakan aktivitas jasa yang berfungsi menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan untuk bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi (Kieso et al, 2018). Dalam lingkup penelitian ilmiah, akuntansi tidak hanya dipandang sebagai prosedur teknis pencatatan, tetapi juga sebagai disiplin ilmu yang menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana, termasuk dalam konteks lembaga keuangan seperti koperasi (Hery, 2015). Pentingnya akuntansi dalam sebuah organisasi dipertegas oleh penelitian yang menyatakan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi yang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang memiliki karakteristik kualitatif seperti relevan, dapat diandalkan, dan dapat dibandingkan. Hal ini menjadi krusial bagi entitas seperti Koperasi Simpan Pinjam guna menjaga kepercayaan anggota terhadap pengelolaan modal yang telah disetorkan.

2.4 Peran Akuntansi

Akuntansi memegang peranan vital dalam operasional sebuah entitas, terutama sebagai penyedia data keuangan yang menjadi dasar pengambilan keputusan strategis. Menurut (Mulyadi, 2016), peran utama akuntansi adalah sebagai alat pertanggungjawaban *stewardship* manajemen kepada pihak pemilik modal atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Dalam konteks ini, akuntansi tidak hanya mencatat transaksi, tetapi juga berfungsi sebagai sistem pengendalian intern yang meminimalkan risiko kecurangan dan kesalahan pengelolaan keuangan.

Secara lebih spesifik, peran akuntansi dapat dibagi menjadi beberapa fungsi krusial sebagaimana dijelaskan dalam penelitian (Rahmawati, 2019), yaitu:

- 1) Penyedia informasi keuangan: memberikan gambaran mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas

yang bermanfaat bagi pemakai informasi (investor, kreditur, dan anggota koperasi).

- 2) Alat pengambilan keputusan: memungkinkan manajer untuk mengevaluasi kinerja masa lalu dan merencanakan langkah strategis di masa depan berdasarkan tren keuangan yang tercatat.
- 3) Alat perencanaan dan pengendalian: melalui penyusunan anggaran, akuntansi membantu organisasi dalam menetapkan target dan memantau realisasi penggunaan dana agar tetap efisien.

Bagi lembaga keuangan seperti Koperasi Simpan Pinjam, akuntansi memiliki peran tambahan sebagai instrumen transparansi untuk membangun kepercayaan *trust* anggota. Sebagaimana ditegaskan oleh (Setiawan, A H, 2020), akuntansi yang akurat pada koperasi membantu dalam menghitung pembagian Sisa Hasil Usaha secara adil sesuai dengan partisipasi ekonomi masing-masing anggota, sehingga prinsip keadilan dalam koperasi tetap terjaga.

2.5 Transparansi

Secara konseptual, transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat atau pihak berkepentingan untuk mengakses informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, serta hasil yang dicapai oleh suatu entitas. Menurut (Krina, 2003), transparansi merupakan prinsip yang menjamin adanya kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan organisasi, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Informasi tersebut harus dapat diakses secara mudah, tersedia bagi publik, dan dapat dimengerti agar tercipta pengawasan yang efektif.

Dalam konteks organisasi, transparansi berfungsi untuk membangun kepercayaan timbal balik antara pengelola dan pemangku kepentingan melalui penyediaan informasi yang akurat dan tepat waktu. Sebagaimana dijelaskan oleh (Handayani, T., & Sutaryo, 2018), transparansi menuntut adanya keterbukaan informasi yang bersifat material dan relevan, sehingga

memungkinkan pihak luar untuk melakukan penilaian terhadap kinerja organisasi secara objektif. Tanpa adanya transparansi, akan muncul asimetri informasi yang dapat memicu ketidakpercayaan dan risiko penyalahgunaan wewenang oleh pihak internal organisasi.

Selain itu transparansi dipandang sebagai syarat mutlak dalam mewujudkan tata kelola yang baik *Good Governance*. Menurut penelitian (Wardani, 2020), transparansi bukan hanya sekadar memberikan data, melainkan menyangkut kualitas informasi yang disajikan, yaitu informasi yang utuh, dapat dipercaya, dan tepat waktu. Dalam lingkup lembaga keuangan seperti koperasi, tingkat transparansi yang tinggi menjadi tolok ukur profesionalisme pengurus dalam mengelola amanah anggota, sekaligus menjadi instrumen untuk memitigasi konflik kepentingan di dalam organisasi.

2.6 Transparansi Keuangan

Transparansi keuangan merupakan salah satu pilar utama dalam tata kelola organisasi yang baik *Good Corporate Governance*. Secara konseptual, transparansi keuangan didefinisikan sebagai ketersediaan informasi keuangan yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan secara tepat waktu, relevan, andal, dan dapat dibandingkan (Mardiasmo, 2018). Informasi tersebut harus mencakup kondisi keuangan yang sebenarnya, termasuk kinerja, posisi keuangan, dan aliran kas, tanpa ada yang disembunyikan.

Dalam konteks organisasi nirlaba atau koperasi, transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen untuk membangun legitimasi dan kepercayaan publik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Wahyudi, 2019), transparansi keuangan mencakup keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta keterbukaan dalam menyajikan informasi material dan relevan mengenai kegiatan organisasi. Dengan adanya transparansi, para pemangku kepentingan khususnya anggota koperasi dapat melakukan pengawasan terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya yang mereka setorkan.

Lebih lanjut, keterbukaan informasi keuangan bertujuan untuk mengurangi adanya asimetri informasi antara pengelola (pengurus) dan pemilik (anggota). Sebagaimana dijelaskan oleh (Pratama, A., & Sari, 2020), laporan keuangan yang transparan harus memenuhi standar yang berlaku dan disajikan secara jujur. Dalam lingkup Koperasi Simpan Pinjam, transparansi keuangan menjadi faktor determinan dalam meminimalisir risiko moral (*moral hazard*) dan memastikan bahwa pengelolaan dana simpanan anggota dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan keterbukaan (Hidayat, 2022).

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

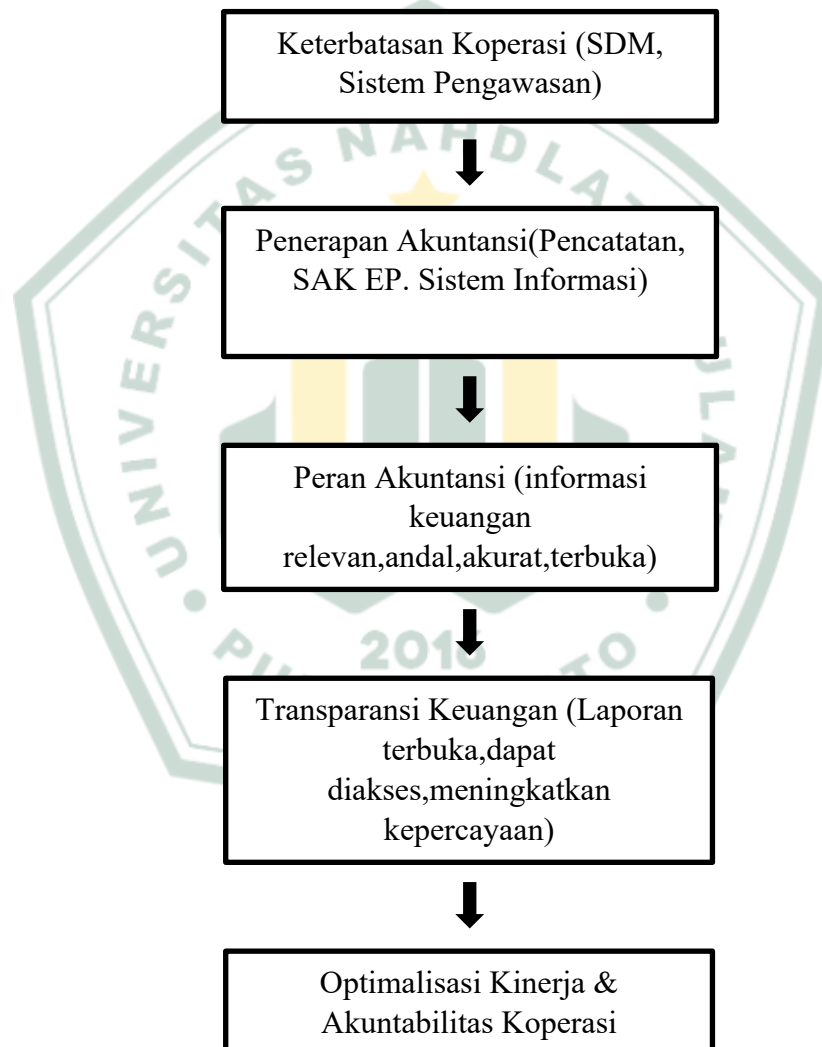
No	Penulisan/ Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Sari & Handayani (2023) Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat dan Pengendalian Internal terhadap Transparansi Keuangan Koperasi di Jawa Barat.	Kepatuhan terhadap SAK EP dan sistem pengendalian internal yang efektif berkorelasi positif signifikan terhadap tingkat transparansi.	Penelitian terdahulu bersifat kuantitatif (<i>survei</i>) dan luas di Jawa Barat. Penelitian ini adalah studi kasus kualitatif mendalam di KSP spesifik untuk mengurai <i>mekanisme</i> optimalisasi.
2.	Wibowo (2024) Analisis Peran Kualitas Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam Peningkatan Akuntabilitas Koperasi Simpan Pinjam.	Kualitas sistem informasi akuntansi (akurasi dan kecepatan) sangat menentukan akuntabilitas pengurus kepada anggota.	Penelitian terdahulu fokus pada akuntabilitas sebagai <i>output</i> . Penelitian ini fokus pada transparansi (<i>disclosure</i> dan aksesibilitas) sebagai dimensi spesifik dari akuntabilitas.
3.	Pranoto & Dewi (2022) Tingkat Pengungkapan	Pengungkapan yang lengkap dan mudah	Penelitian terdahulu adalah studi kuantitatif

No	Penulisan/ Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
	Laporan Keuangan Koperasi dan Dampaknya pada Persepsi Asimetri Informasi Anggota.	dipahami mampu menurunkan <i>asimetri informasi</i> antara pengurus dan anggota, sesuai Teori Keagenan.	tentang <i>dampak</i> pengungkapan. Penelitian ini menganalisis peran Akuntansi sebagai <i>penyebab</i> yang memfasilitasi pengungkapan tersebut.
4.	Amin & Santoso Korelasi Implementasi Prinsip Tata Kelola Koperasi yang Baik <i>Good Cooperative Governance Code</i> (GCGC) terhadap Transparansi Keuangan.	Koperasi dengan tingkat implementasi prinsip <i>Good Cooperative Governance Code</i> yang tinggi menunjukkan tingkat transparansi yang lebih baik.	Penelitian terdahulu berfokus pada tata kelola yang luas. Penelitian ini mempersempit fokus pada peran teknis akuntansi sebagai komponen inti dari tata kelola.
5.	Juwita (2023) Analisis Kebutuhan Anggota terhadap Pengungkapan Sukarela dalam Laporan Keuangan Koperasi.	Anggota koperasi memiliki kebutuhan informasi yang melampaui Standar Akuntansi Keuangan (SAK) wajib, khususnya terkait risiko investasi dan dana cadangan.	Penelitian ini menggunakan temuan ini untuk menilai peran akuntansi dalam memfasilitasi pengungkapan sukarela tersebut sebagai bagian dari optimalisasi transparansi.
6.	Nugraha (2024) Efektivitas Kepatuhan Pelaporan Keuangan dan Pengaruhnya terhadap Legitimasi Koperasi di Mata Anggota.	Kepatuhan pelaporan yang tepat waktu dan akurat (yang didukung akuntansi yang baik) mampu mempertahankan legitimasi koperasi.	Penelitian terdahulu fokus pada legitimasi (<i>outcome</i> teoretis). Penelitian ini fokus pada transparansi sebagai praktik manajerial dan pelaporan yang mendahului legitimasi.
7.	Hidayatullah & Basuki	Sistem akuntansi yang	Penelitian terdahulu

No	Penulisan/ Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
	(2022) Peran Akuntansi Sektor Publik dalam Mendukung Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa (Studi Kualitatif).	terstandar sangat berperan dalam memastikan dana dapat dipertanggungjawabkan dan informasinya transparan kepada masyarakat.	menggunakan konteks sektor publik (Dana Desa). Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif serupa pada konteks sektor keuangan mikro koperasi.
8.	Setiawan (2023) Analisis Kualitatif Tantangan SDM Akuntansi Koperasi dalam Penyajian Laporan yang Transparan.	Keterbatasan kompetensi SDM di koperasi menjadi hambatan utama dalam menghasilkan laporan yang memenuhi standar transparansi penuh.	Penelitian terdahulu fokus pada tantangan SDM sebagai kendala. Penelitian ini fokus pada solusi dan optimalisasi peran akuntansi meskipun ada tantangan SDM.
9.	Siregar (2024) Pengaruh Pelatihan Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Koperasi.	Pelatihan yang intensif dan berkesinambungan terbukti signifikan meningkatkan kualitas laporan, yang berarti meningkatkan fondasi transparansi.	Penelitian terdahulu adalah kuantitatif tentang dampak pelatihan. Penelitian Anda menganalisis peran dan dampak sistem Akuntansi yang sudah ada di Koperasi Simpan Pinjam spesifik.
10.	Dewi & Putra (2025) Perbandingan Praktik <i>Disclosure</i> Keuangan Koperasi Simpan Pinjam: Studi Komparatif Dua Wilayah.	Terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat <i>disclosure</i> (transparansi) antara KSP yang memiliki pendampingan regulator dan yang tidak.	Penelitian terdahulu bersifat komparatif regional. Penelitian ini adalah studi kasus tunggal untuk memberikan solusi optimalisasi yang sangat spesifik dan aplikatif bagi KSP Berkah Mulya Sejahtera.

2.8 Kerangka Berpikir

Menurut (Sugiyono, 2016), kerangka berpikir merupakan hasil penalaran yang disusun berdasarkan teori dan kajian pustaka untuk menjelaskan alur berpikir peneliti dalam menganalisis permasalahan. Dengan adanya kerangka berpikir ini, peneliti dapat menggambarkan hubungan logis antar konsep atau variabel yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini menyusun alur berpikir untuk menggambarkan keterkaitan antara keterbatasan koperasi, penerapan akuntansi, maupun optimalisasi kinerja akuntabilitasnya.



Gambar 1 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun untuk menjelaskan alur logis mengenai bagaimana peran akuntansi dapat dioptimalkan dalam meningkatkan transparansi keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkah Mulya Sejahtera. Kerangka ini dibangun berdasarkan landasan teori, temuan penelitian terdahulu, serta kondisi empiris yang terjadi di koperasi, sehingga mampu menggambarkan hubungan sebab-akibat antar konsep yang diteliti secara sistematis.

Kerangka berpikir penelitian ini diawali dari adanya keterbatasan internal yang dihadapi koperasi, khususnya pada aspek kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang akuntansi, rendahnya pemahaman standar akuntansi, serta lemahnya mekanisme pengendalian internal. Kondisi ini berpotensi menghambat proses pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan, sehingga kualitas informasi keuangan yang dihasilkan cenderung kurang transparan, sulit dipahami, dan sulit diakses oleh anggota. Keterbatasan internal tersebut kemudian dihadapkan pada urgensi penerapan akuntansi yang memadai, yang mencakup pencatatan transaksi terstruktur, kepatuhan terhadap standar akuntansi seperti SAK EP, serta pemanfaatan sistem informasi akuntansi. Meskipun koperasi masih menghadapi berbagai kendala internal, implementasi akuntansi yang tepat, akurat, dan andal ini diharapkan mampu menjadi landasan kuat dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan secara keseluruhan.

Penerapan akuntansi yang berjalan secara optimal selanjutnya akan memperkuat peran akuntansi tidak hanya sebagai aktivitas pencatatan, melainkan sebagai media komunikasi, pengendalian, dan pertanggungjawaban pengurus kepada anggota. Pada tahap ini, akuntansi berperan meminimalkan *asimetri informasi* antara pengurus dan anggota sebagaimana dijelaskan dalam *teori agency*, sekaligus mencerminkan komitmen pengurus sebagai pengelola yang amanah sesuai dengan *teori stewardship*. Optimalnya peran tersebut akan bermuara pada terciptanya transparansi keuangan melalui penyediaan laporan yang terbuka, mudah

diakses, mudah dipahami, serta tepat waktu. Pada tahap akhir, transparansi keuangan yang terwujud melalui peran akuntansi yang efektif ini akan mendorong optimalisasi kinerja, membangun kepercayaan anggota, serta memperkuat akuntabilitas pengurus demi keberlanjutan operasional koperasi secara keseluruhan.

